

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Berdasarkan kota pencatatan di Sulawesi Utara, pada triwulan I 2021, inflasi Kota Manado meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dan bergerak ke rentang target inflasi. Inflasi Kota Manado pada triwulan I 2021 tercatat sebesar 1,65% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar -0,18% (yoy). Inflasi bulanan di kota Kotamobagu bulan Januari-Maret 2021 tercatat masing-masing sebesar 0,23%, -0,21%, dan -0,33% (mtm). Sementara itu, secara tahunan inflasi Kotamobagu sebesar 1,94% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,67% (yoy). Memasuki bulan Mei 2021, tekanan inflasi di Sulut cenderung melambat. Berdasarkan data realisasi inflasi BPS pada bulan Mei 2021, Manado cenderung deflatif sementara Kotamobagu masih mencatatkan inflasi, namun lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan April 2021.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kenaikan IHK komoditas perikanan di Sulut tak lepas rai adanya anomali cuaca di wilayah Sulut sebagai dampak langsung dari Topan Surigae yang mencapai puncaknya pada April 2021. Topan yang bersifat siklus tersebut, berdasarkan analisis BMKG berdampak pada kenaikan intensitas hujan dan gelombang laut di wilayah Indonesia bagian utara termasuk di dalamnya adalah perairan Sulut. Anomali kondisi alam tersebut berdampak pada imbauan untuk membatasi pelayaran nelayan terutama di wilayah Sulawesi Utara. Fenomena tersebut diperkirakan mengurangi intensitas nelayan melaut sehingga berdampak pada penurunan pasokan komoditas perikanan di Sulawesi Utara.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Koordinasi lintas TPID kabupaten/kota terutama dengan TPID di wilayah produsen pangan termasuk implementasi kesepakatan Kerjasama Antar Daerah (KAD), penting diperkuat untuk mengantisipasi potensi permasalahan pasokan, distribusi maupun keterjangkauan harga secara dini. Selain itu, guna mendorong realisasi konsumsi dengan tetap menjaga protokol pengendalian COVID-19, pemanfaatan platform penjualan online diantaranya melalui TTIC milik pemerintah oleh petani/pedagang pasar, disamping penggunaan QRIS dalam transaksi dapat menjadi solusi menjaga pergerakan perekonomian dan mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan di Sulut.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam mendorong terjaganya pasokan di pasar TPID mencanangkan tiga strategi untuk dilakukan pada tahun 2021. Pertama, melalui peningkatan kemandirian pangan melalui program Barito. Kemandirian pangan dalam bentuk penanaman Barito diharapkan dapat mengurangi tekanan permintaan komoditas strategis Sulut di pasar, sehingga kenaikan harga secara cepat cenderung tertahan. Strategi kedua adalah dengan menjaga level cadangan beras pemerintah (CBP) dan mendukung penguatan CBP. Beras sebagai sumber utama karbohidrat masyarakat Sulut perlu terus dijaga pasokannya untuk menjaga agar harga beras tetap stabil dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pergerakan IHK di Manado maupun Kotamobagu secara umum. Strategi ketiga, TPID akan melakukan kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan menjelang hari raya besar keagamaan (HBKN)

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Upaya bersama serta sinergi seluruh dinas dan kementerian/lembaga terkait untuk menjaga ketersediaan pasokan komoditas strategis perlu dilakukan guna mengendalikan inflasi. Ketersediaan pasokan dan manajemen ketersediaan stok pangan se-Sulampua (Sulawesi, Maluku, dan Papua) perlu didorong untuk meningkatkan efektivitas langkah-langkah pengendalian. Salah satu bentuk kerjasama yang dapat menjadi alternatif adalah Kerjasama Antar Daerah (KAD). Dengan adanya KAD, mekanisme perdagangan diharapkan dapat berjalan lebih efisien terutama dalam hal distribusi. Kerjasama antar Daerah (KAD) yang saat ini sedang dilaksanakan adalah KAD antara Sulut, Maluku Utara dan Gorontalo.